

PREFERENSI PEMILIH MUSLIMS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2020 DI SUMATERA BARAT DAN SULAWESI UTARA

DELMUS PUNERI SALIM

IAIN Manado
delmus.salim@gmail.com

Abstract

This article focuses on the influence of religious sentiment in the simultaneous regional head elections in West Sumatra and North Sulawesi in 2020. This article discusses political behavior that is influenced by the religion of voters in provinces with a Muslim majority and minority. Data collection was carried out by survey using interviews and online applications with Muslim voters on the reasons that influenced them in choosing regional heads. This study reveals that religious sentiments have a strong influence on Muslim political behavior in West Sumatra and not in North Sulawesi. This Muslim political behavior is related to the history of colonialism in Indonesia and the management of religious resources in the two areas studied. Regional heads in Muslim-majority and minority areas greatly influence the dynamics of religious resources in the areas they lead. This study, in turn, highlights the importance of developing strategies for managing religious resources in Indonesia.

Kata Kunci: : Politik, Sentimen Agama, Pilkada, Sumber Daya Keagamaan

A. Pendahuluan

Sentimen agama selalu mempengaruhi perilaku pemilih Muslim di Indonesia. Dinamika politik masa lalu dan kontemporer Indonesia telah menunjukkan pengaruh sentimen ini. Agama mewarnai politik Indonesia sejak berdirinya negara,¹ disamping, sentimen suku.² Di tingkat lokal, sentimen agama meningkat tajam setelah pemilihan Gubernur DKI.³

¹ Schirrmacher, A. (2016). Christine Political Islam When Faith Turns Out to Be Politics. *The WEA Global Issues*. Series Volume 16.

² Abdullah, B. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

³ Iqbal, M. and Nasution, A. H. (2010). *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Kencana.



Sentimen suku dan agama secara bersamaan juga mempengaruhi pemilih di Jakarta pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.⁴ Namun, hingga saat ini belum ada studi kuantitatif sistematis yang meneliti sentimen agama dan membandingkan pengaruh relatifnya di daerah mayoritas dan minoritas Muslim di Indonesia.

Studi ini mengisi kesenjangan dalam literatur dengan mengkaji perilaku pemilih Muslim di daerah mayoritas dan minoritas Muslim pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 di provinsi Sulawesi Utara dan Sumatera Barat. Pemilihan Kepala Daerah calon wakil walikota Manado satu-satunya berasal dari calon Muslim kalah dalam pemilihan dan hanya mendapatkan 13,4 persen bersama pasangannya dari hampir 40 persen warga Muslim kota Manado meskipun didukung oleh tokoh Muslim Manado dan organisasi masyarakat Laskar Kopiah Putih kota Manado. Pemenangnya adalah calon beragama Konghucu dan bersuku Tionghoa. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Barat menampilkan calon wakil gubernur yang mengembalikan dukungan dari partai yang pimpinannya menganggap daerah Sumatera Barat terlalu agamis dan kurang Pancasila. Calon wakil gubernur tersebut menjauhkan dirinya dari partai yang diasosiasikan kurang beragama tetapi tetap kalah dalam pemilihan.⁵

Studi ini menganalisis apakah responden Muslim cenderung memilih calon Muslim dibandingkan calon non-Muslim baik di daerah mayoritas maupun di daerah minoritas Muslim?. Apakah responden Muslim cenderung memilih calon dengan identitas dominan baik di daerah mayoritas dan daerah minoritas?. Apakah responden Muslim cenderung memilih calon Muslim atau non-Muslim karena faktor lain? Studi mengukur sentimen agama dalam pemilihan umum di Indonesia dan mengembangkan bagaimana sentimen agama membentuk perilaku politik dan berkontribusi pada perilaku pemilih Muslim dalam politik mayoritas dan politik minoritas di pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Studi juga bertujuan

⁴ Ibid.

⁵ Bakhtiar, A. (1997). *Filsafat Agama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.



untuk berkontribusi tentang perdebatan yang lebih luas tentang politik dan agama di Indonesia.

Studi tentang perilaku pemilih Muslim sebagian besar fokus pada pertanyaan apakah Muslim mendukung kandidat atau partai Islam tanpa syarat. Para sarjana menunjukkan sedikit bukti untuk dukungan tanpa syarat tersebut terhadap kandidat atau partai Islam.⁶ Dukungan tanpa syarat tersebut ada, jika pemilih tidak yakin terhadap kinerja kandidat atau partai (Pepinsky, Liddle, dan Mujani 2012). Studi tentang politik minoritas menunjukkan bahwa pemilih dari agama mayoritas hampir selalu tidak mendukung kandidat dari agama minoritas.

Kurzman dan Naqvi (2010) menganalisa setiap pemilihan parlemen dalam masyarakat Muslim selama 40 tahun terakhir dan menunjukkan bahwa partai-partai Islam sering bersaing dan jarang menang dalam pemilihan umum bebas di berbagai negara Muslim demokratis. Mereka juga berpendapat partai-partai Islam telah bertransformasi sejak 1980-an untuk mendukung demokrasi dan hak-hak perempuan secara terbuka.

Mujani dan Liddle (2009) menyebutkan bahwa setelah 10 tahun demokrasi di Indonesia partai politik nasionalis masih menguasai pemilihan umum di Indonesia karena alasan keberagaman agama dalam sejarah bangsa, kebijakan presiden Suharto selama Orde Baru, masifnya komunitas Muslim toleran dan ketidakefektifan mobilisasi masa oleh partai-partai Islam.⁷

Pepinsky, Liddle, dan Mujani (2012) berpendapat bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa Muslim yang saleh lebih atau kurang demokratis, lebih atau kurang berorientasi pasar, atau lebih atau kurang kosmopolitan dibandingkan rekan-rekan Muslim yang kurang saleh. Mereka menunjukkan bahwa kesalahan

⁶ Saiful Mujani, William Liddle dan Kuskridho, Kuasa Rakyat “analisis tentang Prilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru, (Jakarta: Mizan, 2009).

⁷ Ibid.



secara alami tidak menghambat kecenderungan menuju modernitas, demokrasi, atau kosmopolitanisme.⁸

Studi ini melihat bagaimana sentimen agama pada perilaku Muslim dalam politik mayoritas dan politik minoritas. Studi ini menggambarkan bagaimana Muslim dalam masyarakat Mayoritas dan Minoritas merespon kandidat dengan sentimen agama. Studi ini secara normatif sangat penting. Kualitas demokrasi di negara-negara Muslim bisa dilihat dari bagaimana mayoritas perilaku politik Muslim terhadap kandidat minoritas. Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan pemilihan umum yang bebas, tetapi juga perwakilan yang memadai dari kelompok minoritasnya.

Menchik (2016) menunjukkan sentimen agama selalu mempengaruhi perilaku pemilih Muslim di Indonesia. Dinamika politik masa lalu dan kontemporer Indonesia telah menunjukkan pengaruh sentimen ini. Agama mewarnai politik Indonesia sejak negara Indonesia merdeka. Sentimen suku juga memainkan peran utama dalam politik Indonesia.⁹ Di tingkat lokal, sentimen agama semakin meningkat tajam setelah pemilihan Gubernur DKI. Sentimen suku dan agama secara bersamaan juga mempengaruhi pemilih Gubernur di Jakarta pada tahun 2017 (Sumaktoyo 2021). Namun, hingga saat ini belum ada studi kuantitatif sistematis yang meneliti sentimen agama dan membandingkan pengaruh relatifnya di daerah mayoritas dan minoritas Muslim di Indonesia.

Sentimen agama selalu memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Dari sisi agama, sejak kemerdekaan, Indonesia sudah menghadapi perdebatan apakah harus memasukkan kewajiban menjalankan agama atau tidak dalam konstitusinya.¹⁰ Studi-studi juga menunjukkan pengaruh organisasi keagamaan yang meningkat. Organisasi Islam konservatif telah berkontribusi pada peningkatan

⁸ ibid

⁹ Armajani, J. (2012). *Modern Islamist Movements*. Oxford: Wiley-Balckwell

¹⁰ Curran, T. (1989). Politics in Classical Greece: The Nature of the Polis and the Origins of the Rule of Law, *Sacred Heart University Review*. 9 (2).



diskriminasi sosial terhadap minoritas agama (Sumaktoyo 2020) dan kelompok pemilih Muslim konservatif menjadi lebih berpengaruh dalam politik.¹¹

Dengan semakin meningkatnya pengaruh agama dalam politik, studi ini melihat bagaimana agama mempengaruhi perilaku pemilih. Ada banyak studi yang menunjukkan perilaku pemilih Muslim Indonesia. Survei oleh Lembaga Survei Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa pada tahun 2018, sekitar 52 persen orang Indonesia keberatan memiliki gubernur non-Muslim, meningkat 12 poin dari tahun 2016. Menganalisis hasil pemilihan presiden tahun 2014, Gueorguiev, Ostwald, dan Schuler (2018) juga menunjukkan bahwa agama berpengaruh kuat di wilayah Muslim konservatif yang sangat menyukai Prabowo Subianto daripada Joko Widodo. Sumaktoyo, Ottati, dan Untoro (2016) menunjukkan bahwa sikap menjadi lebih beragama meningkatkan dukungan pemilih untuk seorang kandidat dengan agama yang sama dan Pepinsky, Liddle, dan Mujani (2012) menemukan bahwa label Islam mempengaruhi dukungan pemilih untuk sebuah partai di bawah ketidakpastian ekonomi. Ideologi agama mempengaruhi pilihan pemilih dan kebijakan di Indonesia.¹² Dalam studi terbaru, Sumaktoyo (2021) menunjukkan agama sangat berpengaruh dalam sikap pemilih Muslim dalam pilkada Gubernur DKI 2017, tetapi bukan sebagai faktor tunggal.

Agama bukanlah satu-satunya faktor yang membentuk perilaku politik di Indonesia. Studi lain menunjukkan bahwa suku juga sangat berperan.¹³ Toha (2017) beranggapan bahwa suku sangat berperan dalam masyarakat yang terdiri dari beragam suku di Indonesia. Aspinall (2011) menggambarkan peran suku dalam politik lokal di masa awal reformasi di Indonesia dan Mavridis (2015) menunjukkan peran suku dalam relasi sosial politik di Indonesia.

¹¹ Durkheim, É. 1963[1912]. *The Elementary Forms of the Religious Life*. Translated from the French by Joseph Ward Swain. New York: Collier Books.

¹² Diego Fossati, Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi, Eve Warburton, *Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case, electoral studies*, 2020.

¹³ Heywood, A. (2016). *Politics*. Palgrave.
Heywood, A. (2016). *Politics*. Palgrave.



Studi ini melihat apakah sentimen agama atau factor lain yang lebih tinggi mempengaruhi perilaku pemilih pada pemilu kepala daerah serentak tahun 2020 di daerah mayoritas dan minoritas Muslim di Indonesia.¹⁴

Dari sisi sentimen suku, Indonesia memiliki sejarah panjang sentimen anti-Tionghoa dari zaman kolonial Belanda (Purdey 2006). Di bawah pemerintahan Belanda, suku Tionghoa didorong dalam perdagangan, dipisahkan dari penduduk setempat secara ekonomi dan sosial. Ini menandai dimulainya ketegangan yang mendalam antara penduduk setempat dengan suku Tionghoa. Pada masa Presiden Suharto perayaan budaya Tionghoa dilarang dan setiap individu suku Tionghoa diwajibkan untuk mengajukan surat klarifikasi kewarganegaraan. Sesaat sebelum pengunduran diri presiden Soeharto, banyak warga suku Tionghoa dibunuh, diperkosa, dan ribuan bisnis milik Tionghoa dirusak atau dijarah (Wibowo 2001).

Sentimen anti-Tionghoa ini juga ditemukan dalam politik elektoral. Kandidat politik suku Tionghoa menghadapi tantangan pemilu yang serius. Aspinall, Dettman, dan Warburton (2011) mendokumentasikan penolakan semacam itu terhadap calon non- Muslim, suku Tionghoa yang mencalonkan diri sebagai walikota di Sumatera Utara tahun 2010. Secara lebih umum, survei nasional menemukan bahwa 64,4 persen orang Indonesia merasa tidak nyaman dengan suku Tionghoa dalam posisi kepemimpinan politik.¹⁵

Sentimen anti suku non-Minang di Sumatera Barat juga menguat di pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2010. Pasangan dengan wakil bupati dari suku Mandahiling Batak menang dalam pemilihan dan digugat oleh yang lain karena sentimen suku.¹⁶

Ada beberapa istilah dalam pembahasan politik dan Islam, yaitu Islam politik, Islamisme dan politik Islam. Istilah Islam politik terutama mengacu pada

¹⁴ Denoeux, G. (2002). The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam. *Middle East Policy*. 9 p. 61.

¹⁵ Enjang and Tajiri, H. (2009). *Etika Dakwah*. Bandung: Widya Padjajaran.

¹⁶ Fuller, G. (2003). *The Future of Political Islam*. New York: Palgrave.



reformasi institusi dan sistem politik, sedangkan Islamisme umumnya dikaitkan dengan gerakan sosial yang berpartisipasi dalam reformasi social politik kelembagaan. Dan politik Islam pada umumnya diungkapkan dalam istilah-istilah Islam seperti jihad, siyasah dan syura dalam reformasi politik. Namun, istilah-istilah ini saling terkait dan kadang-kadang dapat dipertukarkan.

Selama beberapa dekade terakhir, politik Islam telah menjadi titik acuan sentral untuk berbagai kegiatan politik, argumen dan gerakan oposisi. Di negara-negara demokrasi Islam, beberapa menentang identitas politik berdasarkan afiliasi agama sementara yang lain bersikeras bahwa pemeluk agama harus memilih dalam demokrasi elektoral berdasarkan keyakinan mereka. Beberapa mengklaim bahwa politisi Muslim kontemporer menggunakan Islam untuk tujuan politik. Di Eropa, banyak Muslim menganjurkan akomodasi keyakinan dan praktik keagamaan di tempat umum.¹⁷

Cakupan politik Islam sangat luas. Hal ini karena Islam sebagai salah satu agama besar dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Islam telah dianut oleh hampir seluruh wilayah masyarakat dunia saat ini. Muslim tinggal di negara-negara Islam dan negara-negara Barat sebagai komunitas mayoritas dan minoritas. Di dalam komunitas-komunitas ini, Nabi Muhammad dianggap sebagai pemandu agama dan pemimpin politik dan para penerusnya yang awal mengambil alih otoritas atas komunitas Islam. Namun, tidak ada kesepakatan yang jelas tentang seperti apa seharusnya institusi politik Islam yang ideal, tetapi secara konsisten dipegang bahwa prinsip dan nilai-nilai Muslim harus menjadi intinya.

Para ulama telah mendefinisikan Islam politik sebagai formulasi Islam untuk negara dan masyarakat.¹⁸ Namun para ulama ini fokus pada berbagai sisi Islam politik. Beberapa sarjana telah prihatin dengan politik Islam di negara-negara

¹⁷ Geertz, C. (1993 [1966]). Religion as a cultural system in Clifford G. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. London: Fontana Press.

¹⁸ Knudsen, A. (2003). *Political Islam in the Middle East*. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights.



Barat (Tibi, 2008, 2014; Warner, 2011; dan Schirrmacher, 2016). Tibi berpendapat bahwa umat Islam berjuang untuk menerapkan nilai-nilai Islam di negara-negara Barat sementara Warner bersikeras bahwa penerapan hukum Islam di negara-negara Barat harus ditolak ketika hukum bertentangan dengan nilai-nilai Barat. Schirrmacher menunjukkan gerakan-gerakan Islam tertentu melakukan aktivitas lobi di Eropa untuk mempromosikan implementasi masyarakat Islam. Para ulama ini menyebut Islam politik sebagai implementasi praktik Islam di arena publik di negara-negara Barat.¹⁹

Ulama lain telah berfokus pada Islam politik di negara-negara Islam.²⁰ Denoeux (2002) berpendapat bahwa Islam politik merupakan bentuk instrumentalisasi Islam oleh individu, kelompok dan organisasi yang mengejar tujuan politik dengan meminjam konsep dari tradisi Islam. Fuller (2003) mendefinisikan politik Islam sebagai bagaimana politik dan masyarakat harus diatur dalam dunia Muslim kontemporer dan diimplementasikan dalam beberapa cara berdasarkan keyakinan Islam. Knudsen (2003) sebagai politik Islam sebagai ekspresi politik yang sah mampu memanfaatkan aspirasi tidak hanya dari bagian masyarakat yang lebih miskin tetapi juga dari kelas menengah.²¹ Soage (2009) berpendapat bahwa Islam politik adalah implementasi alami Islam sebagai bentuk pemerintahan karena merupakan reaksi terhadap tantangan westernisasi di dunia Islam. Meijer (2009) menunjukkan munculnya organisasi gerakan politik di dunia Islam dalam upaya mengubah institusi politik. Armajani (2012) menunjukkan ideologi politik di balik gerakan Islam di negara-negara Islam. Rohac (2014) berpendapat bahwa Islam politik sebagai gerakan Islam yang menjalankan pelayanan sosial bagi masyarakat dan membayar dalam memperoleh dukungan dalam kegiatan politik. Para ulama ini menunjukkan Islam politik di negara-negara

¹⁹ Tibi, B. (2014). *Political Islam, World Politics and Europe*. Routledge.

²⁰ Meijer, R. (2009). Towards a Political Islam. The Hague, Netherlands Institute of International Relations. *Clingendael Diplomacy Papers* No. 22.

²¹ Nasution, H. (1985) *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jilid 3, Universitas Indonesia, Jakarta.



Islam sebagai gerakan melawan pemerintah, alasan ideologis di balik gerakan dan hubungan timbal balik antara gerakan Islam dan masyarakat.²²

Beberapa ulama mengkritik implementasi Islam politik di dunia Islam. Mumtaz (1993) berpendapat bahwa Islam politik pada banyak tahap tidak diterapkan di negara-negara Islam karena ia menunjukkan bahwa syuro (konsultasi) dengan rakyat sebagai prinsip utama etika politik Islam ditinggalkan dalam pemilihan kepemimpinan. Demikian pula Sofyan (2012) berpendapat bahwa Islam politik adalah tentang etikanya daripada pragmatismenya dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan seperti yang dipraktikkan di negara-negara Islam. Situmorang (2012) mengemukakan tujuan dan prinsip Islam politik yaitu untuk mencapai tujuan bersama melalui keadilan dan keadilan sosial. Namun, Roy (1996) berpendapat bahwa Islam politik yang berfokus pada kebajikan dan ketakwaan telah gagal di negara-negara Islam.²³

Pergeseran dari gerakan sosial ke gerakan politik dan dari gerakan politik kekerasan ke non-kekerasan adalah kunci keberhasilan Islam politik di dunia Islam seperti yang ditunjukkan oleh beberapa ulama. Tibi (2014) menunjukkan perubahan bentuk gerakan politik kelompok Islam dari kekerasan menjadi partisipasi dalam institusi politik di negara-negara Islam.²⁴ Schirrmacher (2016) berpendapat bahwa pembentukan bentuk Islam politik pertama yang dilembagakan, Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan Islam tanpa kekerasan yang berusaha secara damai mengarahkan pengaruh politik dan sosial di seluruh dunia.

Beberapa ulama juga menunjukkan manfaat Islam politik di dunia Islam. Kholil (2009) menunjukkan keterlibatan partai politik non-agama dengan kelompok Islam dengan melibatkan pemimpin Muslim dalam komite partai, memaksa Muslim untuk menerima ideologi nasional daripada ideologi Islam, dan

²² Rahman, F. (1993). Prinsip Syura dan Peranan Umat Dalam Islam In Mumtaz A. (eds) *Masalah-masalah Teori Politik Islam*.

²³ Esposito, J.L. (1998). *Islam and Politics*. Fourth Edition. Syracuse University Press. Lihat juga Roy, O. (1996). *The Failure of Political Islam*. (Volk, C. Trans.) Harvard University Press.

²⁴ Esposito, J.L. (2005). Introduction: Straight Path. Oxford University Press.



mengusulkan Islam substansial daripada Islam formalistik di dalam negara. Mulkhan (2009) berpendapat bahwa tujuan umum Islam politik adalah untuk memberi manfaat bagi semua manusia termasuk non-Muslim dan ateis. Salim (2015) menunjukkan manifestasi Islam politik melalui peraturan pemerintah dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemerintah. Salim (2016) lebih jauh menunjukkan wacana di balik penerapan syariat Islam oleh partai politik yang menguntungkan mereka.²⁵

Ulama lain telah menunjukkan pluralitas Islam politik. Esposito (1998) berpendapat bahwa tidak mungkin untuk berargumentasi bahwa hanya ada satu teori Islam politik ketika ia mempelajari formulasi Islam untuk negara dan masyarakat di banyak negara Islam. Ia menemukan Islam politik mulai dari wahyu, hukum, situasi politik saat ini, dan kerangka ideologis dan sejarahnya (baik nyata maupun ideal). Suntana (2010) menunjukkan berbagai bentuk Islam politik dari kerangka teoritis hingga pemikiran politik di kalangan pemikir Muslim. Mandaville (2014) berpendapat bahwa Islam politik sebagai manifestasi ganda Islam bagi negara dan masyarakat oleh gerakan-gerakan Islam yang kompleks dan beragam atas nama Islam.²⁶

Secara harfiah, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti negara-kota. Dari kata tersebut munculah konsep polites yang berarti warga negara dan konsep politikos yang berarti kewarganegaraan. Dari bahasa ini, politik berarti usaha untuk mengatur negara-kota dan warganya. Politik juga dapat diambil dari bahasa Inggris, yang berarti pandai dan bijaksana dalam memerintah dan dari bahasa Arab, siyasah, yang berarti mengatur, mengendalikan, mengelola atau mengambil keputusan dan berbuat sesuatu untuk kebaikan. Dari bahasa-bahasa

²⁵ Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

²⁶ Thabrani, A. M. (2015). *Ijtihad Politik Umar Ibn Al-Khattab (Implementasi Fiqh Kontekstual dalam Pemerintahan Islam)*, Nuansa, 12 (2).



tersebut, politik secara umum berarti upaya membuat, mengubah, dan melaksanakan aturan.²⁷

Di luar definisi literal di atas, politik didefinisikan sebagai kekuasaan, pengambilan keputusan, seni negara atau pemerintahan, kebijakan publik, alokasi dan distribusi kesejahteraan. Politik sebagai kekuasaan adalah kapasitas atau kemampuan untuk mengarahkan atau mempengaruhi perilaku orang lain atau jalannya peristiwa. Politik mencakup upaya untuk mempengaruhi isi keputusan, membatasi agenda dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti keputusan melalui kompromi dan konsensus.²⁸ Sebagai seni bernegara atau pemerintahan, politik merupakan upaya untuk menunjukkan kontrol dalam masyarakat melalui pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik. Politik adalah tentang cara mempengaruhi orang lain, individu dan kelompok, di tempat umum. Politik sebagai alokasi dan distribusi kesejahteraan berarti bagaimana mengalokasikan dana di berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, bagian utama dari politik adalah upaya untuk menentukan sistem dan cara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, lobi dan pemungutan suara dalam pengambilan keputusan, membuat aturan yang mengikat warga di tempat-tempat umum, mendanai pembangunan infrastruktur dan layanan, serta mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat. komunitas.

Definisi politik di atas bukannya tanpa masalah. Situasi inilah yang membuat politik sering dipahami dan dipandang negatif karena politik dikaitkan dengan segala cara yang dilakukan politisi dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan serta memenuhi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Para pemimpin politik yang dipilih melalui pemilihan langsung seringkali berbagi kekuasaan di dalam kelompok pendukung mereka sesudahnya.²⁹ Praktik tersebut

²⁷ Dien, M. I. (2004). *Islamic Law: From Historical Foundations to Contemporary Practice*. Notre Dame: The University of Notre Dame Press.

²⁸ Mulkhan, A. M. (2009). *Politik Santri*. Yogyakarta: Kanisius.

²⁹ Mumtaz, A. (1993) *State, Politics and Islam*. translation., American Trust Publication. (Hadi, A. Trans) Bandung: Mizan.



mengkhawatirkan kelompok lain sehingga setiap kelompok melakukan segala cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Untuk itu, Budiharjo menyatakan bahwa politik harus memasukkan tujuan yang baik dalam tujuan politiknya.³⁰ Politik sangat dibentuk oleh nilai-nilai budaya dan ideologi masyarakat pada waktu dan tempat yang berbeda, namun politik terbaik adalah upaya menempatkan kepentingan semua anggota masyarakat di atas kepentingan pribadi dan kelompok.³¹

Membatasi politik untuk mengatur urusan publik juga membuat pembuat kebijakan di pemerintahan sulit dalam merumuskan aturan dalam keluarga, organisasi sosial dan kehidupan pribadi warga negara. Hal inilah yang membuat aturan tentang pernikahan sesama jenis, organisasi sosial yang bertentangan dengan ideologi negara, dan pakaian yang tidak sesuai dengan norma sosial menjadi bermasalah.³² Politik sebagai seni negara mengabaikan politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non-negara atau non-pemerintah. Saat ini lembaga-lembaga sosial nasional seperti organisasi perburuhan dan lembaga internasional seperti Bank Dunia telah membuat, mengubah dan menerapkan aturan-aturan untuk mencapai tujuan kelebagaannya bagi para anggotanya dan mereka yang terkait dengan lembaganya. Apalagi setiap orang pernah berpolitik dalam keluarga dan kelompok kecil bersama teman-temannya.³³

Dengan memahami permasalahan tersebut, maka pengertian politik yang digunakan dalam tulisan ini adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang baik secara individu maupun kelompok dalam mempengaruhi dan atau melibatkan orang lain tentang urusan orang lain atau bersama-sama dalam kehidupan publik atau pribadi dengan memberikan pendapat, mempengaruhi sikap

³⁰ Budiharjo, M. (2015). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

³¹ Tylor, E. B. 1958[1871]. *Primitive Culture*. London: Murray.

³² Natsir, M. (2000). *Islam Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: DDII.

³³ Samuddin, R. (2013). *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press.



dan tindakan. melalui proses interaksi yang menghasilkan kesepakatan atau konflik dalam membangun komunitas seperti negara, kota, organisasi, keluarga dan agama.

Secara harfiah, agama dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu āgama yang artinya tradisi, artinya tidak, dan gama artinya pergi. Dalam istilah ini, agama berarti tidak pergi, tetap pada tempatnya, diwariskan secara turun-temurun atau tradisi.³⁴ Istilah yang sama juga berarti tidak kacau karena berarti tidak dan gama juga berarti kacau. Dari bahasa Latin, religi berasal dari kata religio yang berakar dari kata kerja re-ligare yang berarti mengikat kembali, yaitu mengikatkan diri kepada Tuhan. Dari bahasa Inggris, religi secara informal berarti kegiatan yang dilakukan dengan antusias dan rutin. Sedangkan dari bahasa Arab ad-Dien berarti kekuasaan, ketundukan pada kekuasaan, aturan, dan pahala serta hutang dan kebiasaan.³⁵

Secara terminologis, agama dijelaskan dengan cara yang berbeda. Agama pada awalnya dipahami sebagai kepercayaan terhadap makhluk gaib seperti dewa dan menjiwai jiwa pada setiap makhluk hidup atau tidak. Agama kemudian didefinisikan sebagai suatu sistem kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal yang sakral, kepercayaan, dan praktik yang terintegrasi dalam satu komunitas moral.³⁶ Agama selanjutnya dipahami sebagai sistem simbol yang memberikan ide, menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, menyebabkan kinerja ritual, menempelkan konsep pandangan dunia dan etos pada faktualitas, dan pada akhirnya dilihat sebagai realitas khusus. Dan, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan dan aturan-aturan yang berhubungan dengan manusia lain dan lingkungan.

Definisi agama juga tidak sederhana. Sebagai sebuah keyakinan, agama lebih mudah dipahami jika realitas yang ditawarkan agama diterima tanpa

³⁴ Soage, A. (2009). Introduction to Political Islam. *Religion Compass* 3 (5) page 887–896. Sofyan, A. (2012). *Etika Politik Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

³⁵ Rohac, D. (2014). Understanding Political Islam. *Bulletin of Economic Development*. 20.

³⁶ Stark, R. and Finke, R. (2000). *Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion*. Berkeley: University of California Press.

pertanyaan seperti keberadaan makhluk gaib, kekuatan gaib dan sejenisnya. Dalam pikiran orang beragama, segala sesuatu terjadi karena tekad supranatural, doa sangat penting dan berkat diperlukan. Masalah muncul, seberapa jauh umat beragama membedakan suatu realitas yang terjadi karena penentuan kekuatan gaib atau kekuatan manusia.³⁷

Agama bekerja sebagai platform untuk mengklarifikasi masalah yang kompleks dan irasional, memerangi depresi mental, dan menjelaskan kematian. Mukjizat sering diucapkan oleh orang-orang beragama. Terapis memanfaatkan pengalaman religius sebagai obat bagi mereka yang sakit jiwa dan agama menawarkan cara menghadapi kematian. Apalagi perilaku keagamaan terdapat pada semua makhluk hidup karena setiap hewan memiliki ritualnya masing-masing. Ritual memotivasi dan menggerakkan mereka untuk membangun komunitas.

Ritual diekspresikan dalam suka dan duka dan yang lebih penting mereka menciptakan dan mempertahankan identitas komunal. Dalam konteks ini, perilaku beragama dipahami dari proses apa yang dilakukan oleh umat beragama dan mengapa hal itu dilakukan oleh mereka. Studi agama telah berfokus pada signifikansi agama bagi seseorang atau kelompok daripada pada definisinya. Kondisi ini tidak membuat kita mengabaikan definisi Islam sebagai berikut.

Islam secara harfiah berarti damai, penyerahan total kepada Tuhan, bersih, damai dan aman. Makna-makna tersebut diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung kata Islam.

Makna Islam sebagai damai dapat dilihat dari Al-Quran surah Al-Anfal (8) ayat 61. Makna penyerahan total kepada Tuhan ditemukan dalam surah An-Nisa (4) ayat 125, Al-Anam (6) 162, Ali Imran (3) 83, dan As-Saffat (37) 26. Arti bersih berasal dari surah Asy-Syuara (26) ayat 89, As-Saffat (37) 84. Makna kedamaian dan keselamatan berasal dari surah Maryam (19) ayat 47.

³⁷ Syafiie, I.K (2010). *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.



Secara terminologis, literatur Islam mendefinisikan Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad yang berisi aturan dan petunjuk sebagai pedoman hidup manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat. Namun, makna Islam yang digunakan dalam tulisan ini adalah definisi yang dijelaskan oleh John Esposito (2005). Menurutnya, Islam adalah keragaman keyakinan, sikap, ritual, hukum dan nilai-nilai sosial yang bersumber dari Kitab Suci Al-Qur'an dan pesan-pesan Nabi. Definisi ini menggambarkan keragaman keyakinan, perilaku, ritual dan nilai-nilai sosial yang ditemukan dalam masyarakat Muslim.

B. Pembahasan

a. Muslim dan Kepala Daerah di Sumatera Barat

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Sumatera Barat meliputi pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi dan Bupati walikota di 13 kabupaten dan kotamadya dari 19 kabupaten dan kotamadya yang ada. Daftar pemilih tetap berjumlah 3.719.429 pemilih yang terdiri dari 1.836.825 pemilih laki-laki dan 1.882.604 pemilih perempuan dengan penyebaran 12.548 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 1.158 nagari di Sumatera Barat.

Tabel 1: Daftar Nama Kepala Daerah Terpilih dan Agamanya pada pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2020 di Sumatera Barat

No	Kepala Daerah	Calon Terpilih	Prosentasi Suara	Agama
1	Provinsi Sumatera Barat	Mahyeldi-Audy Joinaldy	32,4 %	Islam-Islam
2	Kabupaten Pesisir Selatan	Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah	57,2 %	Islam-Islam
3	Kabupaten Solok	Epyardi Asda-Jon	35,3 %	Islam-Islam
	Kabupaten Sijunjung	Firman Pandu Benny Dwifa Yuswir -	25 %	Islam-Islam



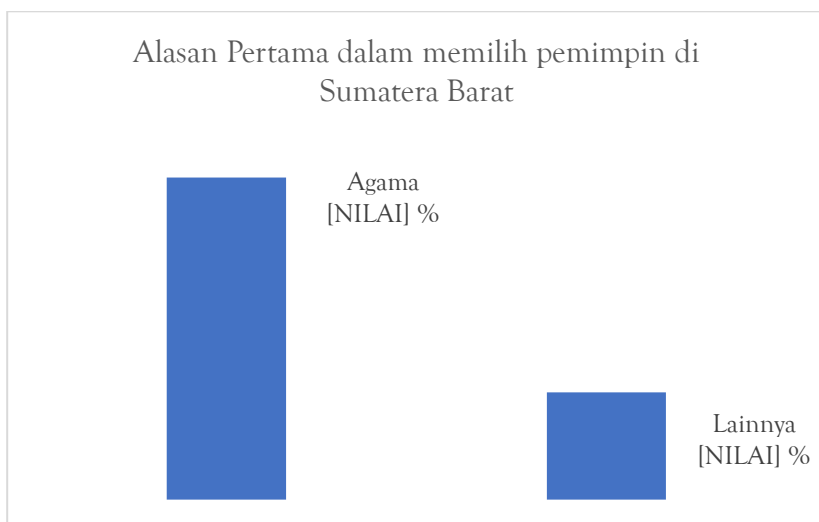
4		Iraddatillah			
	Kabupaten	Eka Putra - Richi	42,5 %	Islam-Islam	
5	Tanah Datar	Aprian			
	Kabupaten	Suhatri Bur - Rahmang	40,7 %	Islam-Islam	
6	Padang Pariaman				
	Kabupaten Agam	Andri Warman - Irwan	32,3 %	Islam-Islam	
7		Fikri,			
	Kabupaten	Safaruddin, Dt Bandaro	31,4 %	Islam-Islam	
8	Limapuluh Kota	Rajo - Rizki			
		Kurniawan. N			
	Kabupaten Pasaman	Benny Utama-Sabar	83 %	Islam-Islam	
9		AS			
	Kabupaten	Sutan Riska Tuanku	63,6 %	Islam-Islam	
10	Dharmasraya	Kerajaan - Dasril Panin			
		Datuk Labuan			
	Kabupaten	Khairunas - Yulian Efi,	38,8 %	Islam-Islam	
11	Solok Selatan				
	Kabupaten	Hamsuardi -	31,5 %	Islam-Islam	
12	Pasaman Barat	Risnawanto			
	Kota Solok	Zul Elfian - Ramadhani	35,3 %	Islam-Islam	
13		Kirana Putra			
	Kota Bukittinggi	Erman Safar - Marfendi	44,5 %	Islam-Islam	
14					

Kami melakukan survei di Sumatera Barat pada bulan Juni dan September 2021. Stratified random sampling digunakan untuk mendapatkan sampel warga Sumatera Barat yang berusia lebih dari tujuh belas tahun atau telah menikah (yaitu pemilih yang memenuhi syarat). Sebanyak 200 responden diwawancarai. Saat ditanya soal apakah mereka memilih berdasarkan agama, 53 persen mengatakan bahwa mereka memilih karena alasan agama sebagai alasan utama. Sekitar 43 persen mengatakan mereka memilih berdasarkan track record calon pemimpin ketimbang alasan lain dan sisanya memilih karena alasan program kerja dan lainnya. Kami membatasi analisis hasil wawancara pada mereka yang menunjukkan pilihan suara karena alasan agama dan mendikotomikan tanggapan



mereka dengan memberikan skor 1 jika responden mengindikasikan bahwa mereka memilih pemimpin karena alasan agama dan 0 untuk alasan lainnya. Tabulasi silang sederhana menunjukkan bahwa Muslim Sumatera Barat cenderung memilih kepala daerah berdasarkan agama atau religiusitasnya.

Tabel 2: Persentasi Alasan Pertama Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Barat



b. Muslim dan Pemimpin Non-Muslim di Sulawesi Utara

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Sulawesi Utara meliputi pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi dan Bupati Walikota di 7 kabupaten dan kotamadya dari 15 kabupaten dan kotamadya yang ada. Daftar pemilih tetap berjumlah 1.831.867 pemilih yang terdiri dari 926.184 pemilih laki-laki dan 905.683 pemilih perempuan dengan penyebaran 5.809 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 1.839 desa di Sulawesi Utara.

Tabel 3: Daftar Nama Kepala Daerah Terpilih dan Agamanya pada pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2020 di Sulawesi utara.

Kepala Daerah	Calon Terpilih	Prosentasi	Agama
---------------	----------------	------------	-------



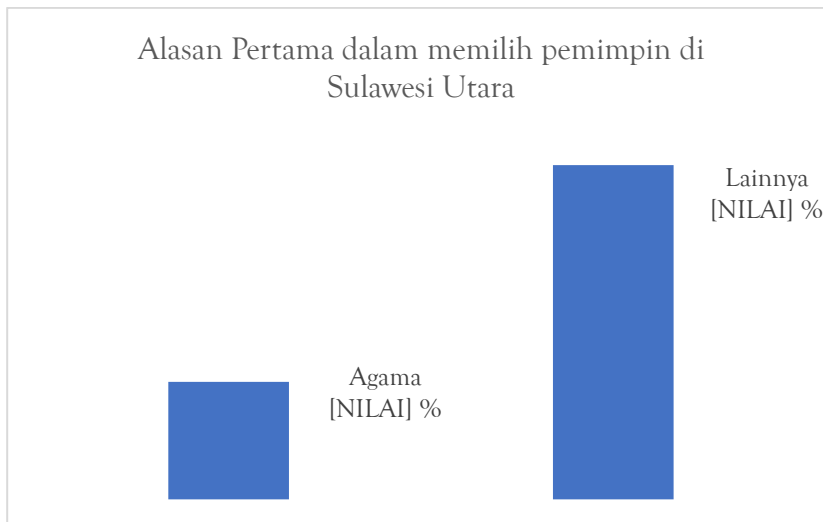
No			Suara	
1	Provinsi Sulawesi Utara	Olly Dondokambey - Steven O. E. Kandouw	57,1 %	Kristen-Kristen
2	Kabupaten Minahasa Selatan	Franky Donny Wongkar - Petra Yani Rembang	53,2 %	Kristen-Kristen
3	Kabupaten Minahasa Utara	Joune J E Ganda - Kevin William Lotulung	57,4 %	Kristen-Kristen
4	Kabupaten Boltim	Sam Sachrul Mamonto - Oskar Manoppo	41,3 %	Islam-Islam
5	Kabupaten Bolsel	Iskandar Kamaru - Deddy Abdul Hamid	75,1 %	Islam-Islam
6	Kota Manado	Andrei Angouw - Richard Henry Marten Sualang	36,7 %	Konghucu-Kristen
7	Kota Bitung	Maurits Mantiri - Hengky Honandar	59,1 %	Kristen-Kristen
8	Kota Tomohon	Caroll Joram Azariaz - Senduk - Wenny Lumentut	64,5 %	Kristen-Kristen

Survei yang sama dilakukan di Sulawesi Utara pada bulan Juli dan September 2021. Sampel warga Sulawesi Utara yang berusia di atas 17 tahun dan sudah menikah atau yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 dijadikan sebagai sampel melalui stratified random sampling. Sebanyak 200 responden diwawancarai. Responden di Sulawesi Utara, ketika ditanya apakah mereka memilih berdasarkan agama, hanya 26 persen menjawab bahwa mereka memilih karena alasan agama sebagai alasan pertama. Sekitar 68 persen mengatakan mereka memilih berdasarkan track record dan program kerja calon pemimpin ketimbang alasan lain dan sisanya memilih karena alasan partai politik penduduk calon pemimpin dan lainnya. Batasan analisis hasil wawancara dilakukan pada mereka yang menunjukkan pilihan suara karena alasan agama dan mengkategorikan tanggapan mereka dengan memberikan skor 1 jika responden mengindikasikan bahwa mereka memilih pemimpin karena alasan



agama dan 0 untuk alasan lainnya. Tabulasi silang sederhana menunjukkan bahwa Muslim Sulawesi Utara tidak memilih kepala daerah berdasarkan agamanya.

Tabel 4: Persentasi Alasan Pertama Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Sulawesi Utara



Apa yang menjelaskan perilaku pemilih Muslim Sumatera Barat dan Sulawesi Utara dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini? Mengapa pemilih Mayoritas Muslim di Sumatera Barat lebih mengutamakan pemimpin berdasarkan agamanya ketimbang faktor lain? Mengapa pemilih Muslim Minoritas di Sulawesi Utara hanya sebagian kecil memilih berdasarkan agamanya? Sebagian besar sarjana telah menjelaskan pengaruh sentimen agama dalam pemilihan umum di Indonesia (Arifianto 2017; Aspinall 2017; Chaplin 2017; Fealy 2016; Lindsey 2016; Mietzner dan Muhtadi 2018; Mietzner, Muhtadi, dan Halida 2018).

Hasil survey diatas menjelaskan beberapa hal. Fakta bahwa kepala daerah sangat menentukan dinamika Sumber Daya keagamaan di daerah kabupaten dan kotamadya serta provinsi. Kepala daerah berpengaruh menentukan pimpinan lembaga-lembaga keagamaan baik yang dimiliki pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan keagamaan. Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten dan Kotamadya

serta Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah juga ikut memberikan rekomendasi langsung maupun secara tidak langsung dalam pemilihan Ketua Majelis Ulama Indonesia tingkat Kabupaten dan Kotamadya serta provinsi. Pimpinan rumah ibadah yang dikelola oleh pemerintah daerah juga ditetapkan oleh kepala daerah. Rekomendasi Kepala Daerah juga mempengaruhi pemilihan pimpinan organisasi kemasyarakatan keagamaan di setiap tingkatan administrasi pemerintahan melalui kantor wilayah kementerian agama.

Situasi ini mendorong keterlibatan elit agama baik di Sumatera Barat maupun di Sulawesi Utara untuk berpartisipasi dan mendukung calon tertentu dalam pemilihan kepala daerah baik calon kepala daerah yang Muslim di Sumatera Barat maupun yang non-Muslim di Sulawesi Utara. Elit agama tersebut akan memiliki peluang lebih besar menguasai sumber daya keagamaan daerah terutama Lembaga yang berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah.

Di Sumatera Barat, semua calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 lalu adalah Muslim dan mayoritas pemilih adalah Muslim. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika pemilih di Sumatera Barat memahami kepala daerah mereka harus beragama mayoritas Islam dan bukan non-Muslim. Bagi Muslim di Sumatera Barat, agama sangat penting dalam pemilihan kepala daerah karena kepala daerah non-Muslim dikhawatirkan akan melakukan proses penyiaran agama non-Muslim seperti yang terjadi pada masa penjajahan. Bagi mereka juga, kepala daerah non-Muslim dikhawatirkan menguasai dan mempengaruhi sumber daya keagamaan dengan memilih pimpinan lembaga keagamaan yang cenderung liberal.

Namun ketika ditanya tentang pengaruh agama dalam pemilihan kepala daerah di antara semua calon yang beragama Islam yang ada saat ini, mereka memahami bahwa tingkat religiusitas setiap calon kepala daerah sangat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Religiusitas pemimpin



dianggap sebagai satu cara terbaik dalam penyelesaian berbagai masalah sosial politik dan ekonomi daerah. Pemimpin yang hidup sederhana dipahami sebagai pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat banyak. Kondisi ekonomi warga yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan dianggap sering diabaikan oleh pemimpin daerah yang hidup mereka cenderung dengan segala kemewahan-kemewahan dan fasilitas yang dibiayai oleh negara. Gubernur Sumatera Barat terpilih pada pemilihan kepala daerah serentak 2020 ini dianggap memiliki kelebihan ini dibandingkan dengan calon-calon gubernur yang lain.³⁸

Indikator religiousitas kedua yang menjadi perhatian pemilih Muslim di Sumatera Barat adalah dukungan kepala daerah terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sendiri maupun oleh lembaga social kemasyarakatan keagamaan. Kehadiran kepala daerah dalam kegiatan keagamaan dan apalagi bantuan finansial terhadap kegiatan keagamaan tersebut dipahami sangat penting. Kebanyakan pemilih Muslim Sumatera Barat memahami bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap lembaga social kemasyarakatan keagamaan dan kegiatan keagamaan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kegiatan keagamaan dilakukan diyakini semakin tinggi tingkat kesejahteraan rakyat tercapai. Tingkat kesejahteraan rakyat meningkat dipahami tercapai dari hal-hal yang tidak rasional, tidak terduga dan bukan hanya dari program kesejahteraan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri yang sering implementasinya tidak berjalan sesuai yang dikonsepskan.

Di Sulawesi Utara, hanya dua pasangan kepala daerah dari 8 pasangan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 lalu adalah Muslim dan mayoritas pemilihnya adalah non-Muslim. Oleh karena itu, hanya 26 persen pemilih Muslim di Sulawesi Utara memahami kepala daerah mereka harus

³⁸ Salim, D.P. (2013). Politics, Islam, and Identity in West Sumatra. *Journal Of Indonesian Islam* 7 (1).



beragama Islam. Ketika ditanya tentang kenapa agama bagi sebagian besar responden bukan menjadi alasan utama dalam pemilihan kepala daerah di Sulawesi Utara mereka menjawab agama tidak menjadi factor utama dalam pemilihan kepala daerah karena kepala daerah non-Muslim lebih tinggi probabilitas terpilihnya ketimbang calon Muslim. Jawaban ini berkaitan dengan peluang Muslim menjadi kepala daerah dalam sistim pemilihan kepala daerah secara langsung seperti saat ini sangat kecil di daerah minoritas Muslim. Alasan berikutnya, dukungan kepala daerah terhadap lembaga dan kegiatan keagamaan lebih penting dari pada identitas agama kepala daerah. Pengalaman pemilih Muslim di kotamadya Manado pada satu dekade sebelumnya dimana identitas keagamaan kepala daerah dianggap tidak sejalan dengan dukungannya terhadap lembaga kemasyarakatan keagamaan Islam dan atau kegiatan keagamaan Islam yang ada. Pemilih Muslim di Sulawesi Utara juga menganggap elit agama Muslim lebih baik mempunyai hubungan yang dekat dengan kepala daerah, yang propabilitas terpilih non-Muslim lebih tinggi, karena kepala daerah akan mempengaruhi sumber daya keagamaan dalam memilih pimpinan lembaga keagamaan. Oleh karena itu, pimpinan Lembaga keagamaan Islam di provinsi Sulawesi Utara dikenal sangat dekat dengan pemerintah daerah.

Kepala Daerah juga mempunyai kewenangan dalam menentukan apakah suatu lembaga kemasyarakatan keagamaan dan atau suatu kegiatan keagamaan mendapatkan bantuan atau tidak dari pemerintah daerah. Kebijakan kepala daerah sangat menentukan suatu lembaga kemasyarakatan keagamaan mendapatkan dana hibah untuk operasional dan kegiatan keagamaannya dari pemerintah daerah setiap tahun. Elit agama di Sumatera Barat dan di Sulawesi Utara menjelaskan bahwa tidak semua kepala daerah memberikan dana hibah dengan jumlah yang tetap setiap tahun dalam dua decade terakhir. Dengan situasi ini, calon kepala daerah yang memberikan peluang bantuan dana hibah kepada pimpinan lembaga keagamaan lebih disukai oleh elit agama. Dalam situasi sebaliknya, elit agama yang mempunyai hubungan yang baik dengan kepala daerah lebih diinginkan



memimpin lembaga kemasyarakatan keagamaan agar kemungkinan mendapatkan bantuan dana hibah tersebut lebih tinggi.

Kepala daerah juga berpengaruh terhadap lembaga kemasyarakatan keagamaan dalam kegiatan utamanya. Di Sumatera Barat, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, peraturan daerah bernuansa Islam paling banyak ditemukan dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia diluar provinsi Aceh yang memiliki otonomi khusus. Peraturan daerah bernuansa Islam ini telah banyak membantu elit agama dalam menjalankan tugas keagaamaanya.

Penutup :

Pengaruh sentimen agama dalam pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara sangat berbeda. Pemilih Muslim mayoritas di Sumatera Barat menempatkan agama sebagai alasan utama dalam pemilihan kepala daerah yang berarti mereka tidak menginginkan daerah mayoritas Muslim dipimpin oleh non-Muslim. Sedangkan pemilih minoritas Muslim di Sulawesi Utara bukan menempatkan identitas agama sebagai prioritas utama tetapi menginginkan calon kepala daerah yang membantu mereka dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Muslim Sumatera Barat sangat mengkhawatirkan kepemimpinan Non-Muslim yang bisa saja menyiarkan agama non-Muslim di daerah mereka dan dengan kewenangan kepala daerah mengangkat pimpinan Lembaga kemasyarakatan keagamaan yang cenderung liberal. Bagi pemilih Sumatera Barat, agama juga dipahami sebagai tingkat religiusitas kepala daerah. Semakin religious seorang kepala daerah semakin baik bagi daerah. Pemilih Muslim di Sulawesi Utara, dengan probabilitas non-Muslim sebagai kepala daerah yang tinggi dalam sistim pemilihan kepala daerah secara langsung saat ini, mengutamakan relasi yang kuat antara kepala Daerah Non-Muslim dengan elit agama sehingga Lembaga kemasyarakatan keagamaan



mempunyai peluang yang lebih tinggi dalam mendapatkan bantuan dana dari kepala daerah.

Implikasi studi ini terhadap kajian politik dan agama adalah pertama sejarah imperialisme masih mempengaruhi perilaku politik Muslim di tanah air. Kedua, ketidak mandirian Lembaga kemasyarakatan keagamaan secara finansial memberikan peluang yang tinggi bagi kepala daerah untuk membangun relasi yang dominan dengan elit agama. Kepala daerah bisa saja memberikan bantuan dana hibah atau tidak kepada Lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.

Studi ini dapat berimplikasi positif dalam rangka pengembangan pemikiran politik dan agama, khususnya masalah perilaku pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia yang dipengaruhi oleh sentimen agama. Studi ini menunjukkan bahwa relasi politik dan agama selalu berkembang dengan dua arah yang berbeda di mayoritas dan minoritas Muslim di Indonesia. Kajian Islam dan politik secara nasional yang cenderung menempatkan Islam sebagai agama mayoritas mengabaikan dinamika Islam dan politik di daerah minoritas Muslim di Indonesia.

Studi ini juga mendorong pengelolaan sumber daya keagamaan harus dinegasikan dari kepentingan politik praktis pada masa dan setelah pemilihan kepala daerah. Pengelolaan sumber daya keagamaan dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan perseorangan, kelompok dan golongan tertentu saja.³⁹

³⁹ Budiharjo, M. (2015). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



REFERENCES

- Schirmacher, A. (2016). Christine Political Islam When Faith Turns Out to Be Politics. *The WEA Global Issues*. Series Volume 16.
- Abdullah, B. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Iqbal, M. and Nasution, A. H. (2010). *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Bakhtiar, A. (1997). *Filsafat Agama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Saiful Mujani, William Liddle dan Kuskridho, Kuasa Rakyat “analisis tentang Prilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru, (Jakarta: Mizan, 2009).
- Armajani, J. (2012). *Modern Islamist Movements*. Oxford: Wiley-Balckwell
- Curran, T. (1989). Politics in Classical Greece: The Nature of the Polis and the Origins of the Rule of Law, *Sacred Heart University Review*. 9 (2).
- Durkheim, É. 1963[1912]. The Elementary Forms of the Religious Life. Translated from the French by Joseph Ward Swain. New York: Collier Books.
- Diego Fossati, Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi, Eve Warburton, Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case, electoral studies, 2020.
- Heywood, A. (2016). *Politics*. Palgrave.
- Denoeux, G. (2002). The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam. *Middle East Policy*. 9 p. 61.
- Enjang and Tajiri, H. (2009). *Etika Dakwah*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Fuller, G. (2003). *The Future of Political Islam*. New York: Palgrave.
- Geertz, C. (1993 [1966]. Religion as a cultural system in Clifford G. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. London: Fontana Press.



- Knudsen, A. (2003). *Political Islam in the Middle East*. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights.
- Tibi, B. (2014). *Political Islam, World Politics and Europe*. Routledge.
- Meijer, R. (2009). Towards a Political Islam. The Hague, Netherlands Institute of International Relations. *Clingendael Diplomacy Papers* No. 22.
- Nasution, H. (1985) *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jilid 3, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rahman, F. (1993). Prinsip Syura dan Peranan Umat Dalam Islam In Mumtaz A. (eds) *Masalah-masalah Teori Politik Islam*.
- Esposito, J.L. (1998). *Islam and Politics*. Fourth Edition. Syracuse University Press. Lihat juga Roy, O. (1996). *The Failure of Political Islam*. (Volk, C. Trans.) Harvard University Press.
- Esposito, J.L. (2005). Introduction: Straight Path. Oxford University Press.
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Thabrani, A. M. (2015). Ijtihad Politik Umar Ibn Al-Khattab (Implementasi Fiqh Kontekstual dalam Pemerintahan Islam), *Nuansa*, 12 (2).
- Dien, M. I. (2004). *Islamic Law: From Historical Foundations to Contemporary Practice*. Notre Dame: The University of Notre Dame Press.
- Mulkhan, A. M. (2009). *Politik Santri*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mumtaz, A. (1993) *State, Politics and Islam*. translation., American Trust Publication. (Hadi, A. Trans) Bandung: Mizan.
- Tylor, E. B. 1958[1871]. *Primitive Culture*. London: Murray.
- Natsir, M. (2000). *Islam Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: DDII.
- Samuddin, R. (2013). *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press.
- Soage, A. (2009). Introduction to Political Islam. *Religon Compass* 3 (5) page 887–896. Sofyan, A. (2012). *Etika Politik Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.



- Rohac, D. (2014). Understanding Political Islam. *Bulletin of Economic Development*. 20.
- Stark, R. and Finke, R. (2000). *Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion*. Berkeley: University of California Press.
- Syafiie, I.K (2010). *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim, D.P. (2013). Politics, Islam, and Identity in West Sumatra. *Journal Of Indonesian Islam* 7 (1).
- Budiharjo, M. (2015). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

